

JAWA TENGAH PEROLEH JATAH 1,1 JUTA TON PUPUK SUBSIDI



Sumber Gambar:

<https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2023/02/08/1519848/670x335/kementan-alokasikan-pupuk-subsidi-11-juta-ton-untuk-jateng.jpg>

Isi Berita

Merdeka.com - Kementerian Pertanian menjatah pupuk subsidi bagi Jawa Tengah Provinsi sebanyak 1.165.609 ton. Nantinya, pupuk tersebut akan dibagikan kepada petani dengan skema yang diatur oleh Kementan RI.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah Supriyanto mengatakan, penentuan alokasi atau jatah pupuk bersubsidi adalah kewenangan Kementan RI.

Tahun 2023, kebutuhan Jateng akan pupuk sekitar 1.462.623,81 ton. Namun, Kementan RI memberi alokasi sebanyak 1.165.609 ton.

Jumlah itu terdiri dari jatah pupuk Urea sebanyak 744.010 ton atau melebihi kebutuhan sebanyak 116 persen. Sementara, pupuk jenis NPK hanya mendapat alokasi sebanyak 420.799 ton atau 52 persen dari kebutuhan dan pupuk NPK Khusus sebanyak 800 ton atau 22 persen.

Sementara di 2022 Jateng memperoleh jatah 1.567.336,50 ton atau naik 10,04% dari tahun 2021 sebanyak 1.424.340,50 ton. Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 723.606 ton, SP-36 sebanyak 87.353 ton, ZA sebanyak 139.473 ton, NPK sebanyak 386.716 ton, dan Organik 230.189 ton.

Pada 2022, data Distanbun Jateng memaparkan, dari alokasi yang diterima hanya sekitar 93 persen yang terserap.

Terkait penurunan jatah pupuk subsidi, itu sesuai dengan Permentan RI no 10/2022. Pada peraturan itu menyebut, pupuk yang disubsidi kini hanya jenis urea, dan jenis NPK. Sementara jenis ZA, SP-36 dan organik dieliminir dari daftar subsidi.

Dengan jumlah alokasi di 2023, diharapkan ketersediaan pupuk khususnya urea tercukupi. Sementara untuk jenis NPK dan NPK Khusus, memang belum tercukupi, satu di antaranya karena biaya pembuatan pupuk jenis ini yang mahal, karena menggunakan bahan impor.

Selain itu, Perang Rusia-Ukraina juga berimbas pada alokasi bahan baku NPK yang terbatas dan mahal.

Terkait isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani, Supriyanto menjelaskan hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keterlambatan distribusi. Hal ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk saat hendak tanam.

Padahal, kios pupuk lengkap (KPL) wajib menyediakan pupuk tiga minggu sebelum musim tanam. Namun demikian, pengawasan distribusi pupuk menurutnya bukan menjadi ranah dari Distanbun.

Selain itu, kurangnya pemahaman petani terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Seperti, belum memiliki kartu tani, tidak mengetahui prosedur pengajuan kartu tani hingga masa berlaku kartu tani yang kedaluwarsa.

Hal lain adalah kebiasaan petani menggunakan pupuk berlebih, tidak sesuai takaran.

"Karena ada beberapa kasus alokasi dalam satu tahun (dua musim) langsung ditebus, sehingga di musim berikutnya sudah tidak punya alokasi," paparnya, dikonfirmasi via telepon, Selasa (7/2).

Supriyanto menjelaskan, Pemprov Jateng dalam hal ini gubernur hanya berwenang menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait alokasi di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemkab atau pemkot yang akan menentukan SK tingkat kecamatan per petani "by name by address".

Adapun, mekanisme penentuan alokasi pupuk bersubsidi didasarkan atas beberapa aspek. Seperti data spasial komoditas, luas lahan baku sawah yang dilindungi, dan penyerapan pupuk tahun sebelumnya.

Kewenangan Pemprov Jateng adalah penentuan alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten/kota. Selanjutnya proses distribusi menjadi kewenangan produsen dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia.

"Distribusi dari pabrik ke distributor, kemudian ke KPL. Distributor ditentukan oleh PT PI, kemudian KPL ditentukan oleh distributor, bukan kami," ungkapnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan Permentan 10/2022 kini hanya sembilan usaha tani yang dicover oleh pupuk bersubsidi. Kelompok pertama adalah tanaman pangan meliputi padi, jagung dan kedelai. Diikuti tanaman hortikultura cabai, bawang merah dan bawang putih.

Terakhir adalah kelompok tanaman perkebunan yakni tebu, kopi dan kakao, masing-masing dengan luas maksimal lahan 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar SIMLUHTAN.

Penentuan sembilan komoditas tersebut, karena dianggap jenis tani tersebut berpengaruh pada inflasi negara.

Untuk pengawasan, Pemprov Jateng memaksimalkan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Selain itu, kini layanan aduan pupuk akan kembali direaktivasi. Di dalamnya terdapat unsur seperti distributor hingga pihak kepolisian guna menyelesaikan permasalahan seputar pupuk subsidi.

Terakhir, Supriyanto berharap agar petani dapat menyikapi permasalahan pupuk bersubsidi dengan bijak. Ia mengajak petani mulai beralih menggunakan pupuk organik. Selain itu dirinya mengajak agar petani tidak berlebihan menggunakan pupuk kimia.

"Selain bisa mengembalikan kesuburan tanah juga bisa menekan biaya produksi. Gunakan pula kearifan lokal dengan membuat dan menggunakan Biosaka untuk semua budidaya petani," pungkash Supriyanto.

Sumber Berita:

1. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kementan-alokasikan-pupuk-subsidi-11-juta-ton-untuk-jateng.html>, Kementan Alokasikan Pupuk Subsidi 1,1 Juta Ton Untuk Jateng, 8 Februari 2023.
2. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/556456/kementan-alokasikan-11-juta-ton-pupuk-subsidi-bagi-jateng>, Kementan Alokasikan 1,1 Juta Ton Pupuk Subsidi Bagi Jateng, 7 Februari 2023.

Catatan:

- Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sector pertanian.
- Alokasi subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang menyebutkan bahwa:
 1. Pasal 3
 - ayat (1), Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. Horikultura; dan/atau

- c. Perkebunan.
 - ayat (2), Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Padi;
 - b. Jagung; dan
 - c. Kedelai.
 - ayat (3), Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cabai;
 - b. bawang merah; dan
 - c. bawang putih.
 - ayat (4), Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tebu rakyat;
 - b. kakao; dan
 - c. kopi.
 - ayat (5), Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
2. Pasal 2 ayat (2), Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Urea; dan
 - b. Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- Jumlah subsidi pupuk di Jawa Tengah menurun dibandingkan tahun 2022, perunanan jatah subsidi tersebut sesuai dengan Permentan RI No.10 Tahun 2022 dimana dalam peraturan tersebut disebutkan hanya terdapat 2 jenis pupuk subsidi yaitu urea dan NPK sedangkan jenis ZA, SP-36 dan organik dieliminir dari daftar subsidi. Penentuan alokasi atau jatah pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Kementerian Pertanian RI sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur hanya berwenang menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait alokasi di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemkab atau pemkot yang akan menentukan SK tingkat kecamatan per petani "*by name by address*".
 - Dengan jumlah alokasi pupuk subsidi tahun 2023, diharapkan ketersediaan pupuk khususnya pupuk urea dapat terpenuhi.